



PNS Diminta Tak Terima Parcel

YOGYA (MERAPI) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Yogyakarta diminta tidak menerima bingkisan Lebaran atau parcel yang berlebihan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya gratifikasi sesuai dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kira semua sudah bisa menyikapi ini. Harus bisa memahami mana hadiah dan mana parcel. Jadi sebaiknya dihindari. Jangan diterima," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di temui di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

Permintaan tidak menerima parcel itu akan dikuatkan dalam Surat Edaran Walikota ke instansi. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemkot

dan Surat Edaran dari KPK.

Dia mengatakan sesuai ketentuan pegawai yang menerima parcel harus melapor. Pemberian parcel yang sifatnya vertikal dari atasan ke bawahan diperbolehkan karena merupakan hadiah. Namun parcel yang diberikan tetap tidak boleh berlebihan.

Bagi pejabat pegawai yang menerima bingkisan Lebaran, disarankan diberikan ke panti asuhan dengan laporan ke kepala SKPD.

Sebelumnya Inspektur Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan pasca dikeluarkannya Perwal Nomor 82 tahun 2013 secara periodik memfasilitasi pelaporan gratifikasi di lingkungan pemkot. Pemkot sudah membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) untuk pelaksanaan perwal itu. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005